

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Kota Batam, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Meskipun secara konsep, PKH merupakan program strategis yang dirancang oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberian bantuan bersyarat, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat implementasi. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah masih rendahnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan, yang menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan program. Hasil wawancara dengan sejumlah narasumber, baik dari kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun masyarakat yang seharusnya layak menerima namun tidak mendapatkan bantuan, menunjukkan adanya ketimpangan dan ketidaksesuaian antara kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah dengan kondisi aktual di lapangan. Banyak masyarakat yang secara ekonomi dianggap mampu tetap menerima bantuan, sementara masyarakat yang tergolong miskin dan memenuhi syarat justru tidak masuk dalam daftar penerima.

Permasalahan ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses validasi dan pembaruan data, serta kurang maksimalnya pengawasan dari pihak pelaksana program di tingkat daerah. Selain itu, faktor komunikasi antara instansi pelaksana,

serta keterbatasan sumber daya manusia yang mendata dan menyalurkan bantuan, turut mempengaruhi efektivitas program secara keseluruhan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan juga membuat penyimpangan dalam implementasi sulit terdeteksi secara cepat. Secara keseluruhan, meskipun PKH memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap penurunan beban pengeluaran keluarga miskin dan mendorong akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, namun ketidakefisienan dalam pelaksanaan membuat tujuan besar program belum sepenuhnya tercapai, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, agar Program Keluarga Harapan benar-benar dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Kota Batam, diperlukan langkah-langkah pembenahan, antara lain: perbaikan sistem pendataan dan validasi, penguatan pengawasan dan evaluasi berkala, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, penting pula untuk melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pengawasan agar tercipta program yang lebih adil, transparan, dan berdampak nyata bagi mereka yang paling membutuhkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi kemiskinan di Kota Batam, ditemukan bahwa implementasi program ini masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal ketepatan sasaran penerima manfaat. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun program ini dirancang dengan tujuan yang baik, keberhasilan di

tingkat pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem pendataan, kapasitas sumber daya manusia, dan tingkat pengawasan yang dilakukan oleh instansi pelaksana.

Agar pelaksanaan program PKH di Kota Batam dapat lebih optimal dan benar-benar memberikan dampak signifikan bagi keluarga miskin, maka diperlukan sejumlah langkah perbaikan yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Saran-saran berikut disusun sebagai bentuk rekomendasi berdasarkan temuan di lapangan dan analisis terhadap pelaksanaan program, yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

Adapun saran-saran tersebut meliputi:

1. Peningkatan Akurasi Data Penerima Manfaat

Pemerintah Kota Batam, khususnya Dinas Sosial dan instansi pelaksana PKH, perlu melakukan pemutakhiran data secara berkala dan menyeluruh untuk memastikan bahwa bantuan PKH tepat sasaran. Pendataan harus melibatkan aparat kelurahan, RT/RW, dan partisipasi aktif masyarakat agar kondisi riil di lapangan benar-benar tercermin dalam basis data.

2. Penguatan Mekanisme Verifikasi Dan Validasi

Diperlukan sistem verifikasi dan validasi yang lebih ketat terhadap calon penerima bantuan. Proses ini sebaiknya dilaksanakan secara transparan dan melibatkan tim independen agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam distribusi bantuan.

3. Peningkatan Pengawasan Dan Evaluasi Berkala

Implementasi program perlu diawasi secara rutin melalui monitoring dan evaluasi yang objektif. Hal ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan serta mengevaluasi dampak bantuan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaksana

Petugas pelaksana PKH di tingkat daerah perlu diberikan pelatihan berkelanjutan agar mereka memiliki kompetensi dalam menangani program, melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menyelesaikan kendala di lapangan secara efektif.

5. Transparansi Dan Keterlibatan Masyarakat

Pemerintah perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau pengaduan terkait pelaksanaan PKH. Dengan keterlibatan masyarakat, kepercayaan terhadap program akan meningkat, dan distribusi bantuan dapat lebih adil dan merata.